

# **EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Rifqi Fauzan Dwi Cahya**  
**Institut Pemerintahan Dalam Negeri**  
E-Mail : Fauzanrifqi07@gmail.com

## **ABSTRAK**

Kabupaten Bangka Tengah masih menjadi salah satu daerah dengan penduduk miskin terbanyak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah adalah Program Keluarga Harapan. Program ini merupakan adaptasi dari program yang dikenal di dunia internasional dengan sebutan *Conditional Cash Transfer (CCT)*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Program Keluarga Harapan serta perannya dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah sudah cukup maksimal. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti akses menuju tempat tinggal penerima bantuan yang jauh dan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program ini

## **ABSTRACT**

*Central Bangka District is still one of the areas with the most poor people in the Bangka Belitung Islands province. One of the programs run by the government of Central Bangka District is the Harapan family Program. This program is an adaptation of the internationally recognized program called Conditional Cash Transfer (CCT). This type of research is qualitative descriptive with an inductive approach. Technical data collection used in this study is interviews, observations and documentation. The purpose of this research is to evaluate the family of Harapan Program and its role in improving people's welfare in Bangka Belitung district. Based on the results of the study can be concluded that the family of Harapan Program that was played in Bangka Tengah District is quite maximal. Nonetheless, there are still some obstacles such as access to the recipient's remote shelter and still lack of public understanding of the program*

Kata Kunci : Evaluasi, Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH)

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan Kemiskinan dan Pendidikan masih menjadi persoalan bangsa Indonesia yang hingga saat ini sulit untuk diselesaikan. Dari masa kemerdekaan hingga sekarang, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini masih juga belum ditemukan. Oleh karena hal tersebut, pemerintah selalu menjadikan dua topik ini sebagai prioritas untuk segera dicari jalan keluarnya. Luasnya wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang tidak merata menjadi faktor utama permasalahan kemiskinan dan pendidikan di Indonesia sulit untuk diselesaikan.

Penyebab kemiskinan di Indonesia juga bermacam-macam mulai dari Laju Pertumbuhan Penduduk yang terus meningkat, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak bekerja, kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran dan distribusi pendapatan yang berbeda antara satu daerah dan lainnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga bulan maret 2018 mencapai 25,95 juta jiwa (9,82 persen).

Selain masalah kemiskinan yang masih belum bisa terselesaikan, pemerintah Indonesia juga belum bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih belum bisa dikatakan baik. Pemerintah cenderung bersikap acuh tak acuh dan berdalih bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih baik dibuktikan dengan banyaknya pelajar Indonesia yang mampu meraih prestasi dalam perlombaan tingkat Nasional maupun Internasional. Sebenarnya hal ini tidaklah salah, melainkan Pemerintah perlu memperhatikan adanya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Karena berdasarkan data yang dirilis Oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah pelajar Indonesia yang putus sekolah masih sangat tinggi.

Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dan pendidikan di Indonesia, pemerintah mengadakan berbagai program yang berlaku secara nasional. Diharapkan dengan adanya program-program tersebut dapat mempercepat pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pembangunan tersebut ditujukan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata sesuai yang diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV

Program yang sampai saat ini menjadi andalan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pendidikan di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan mulai diterapkan pada tahun 2007 sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan mutu dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Program ini terinspirasi dari program yang dikenal di dunia Internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)*.

Kabupaten Bangka Tengah adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2003. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Tengah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tingginya jumlah Masyarakat miskin di Kabupaten Bangka Tengah melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH). Kabupaten Bangka Tengah mulai melaksanakan PKH pada Tahun 2013. Dengan adanya program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat miskin untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan atau fasilitas pendidikan yang ada di sekitar mereka. Cara kerja dari sistem ini adalah bantuan dari pemerintah akan diberikan pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), sebagai timbal balik dari hal tersebut maka masyarakat wajib

untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin.

Sejak dimulainya Program Keluarga Harapan ini pada tahun 2013, terdapat beberapa perubahan dalam permasalahan pendidikan atau kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah. Di sektor kesehatan contohnya, sejak diberlakukan PKH ini Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sayangnya, perbaikan pada sektor kesehatan belum diikuti oleh perbaikan pada sektor pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bangka Tengah.

Dari permasalahan diatas maka beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2013-2018? 2) Apa yang menjadi pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2013-2018? 3) Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2013-2018?

### **Program Keluarga Harapan**

Pengertian program menurut Jones (1996:295) adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Program Keluarga Harapan adalah Program yang dicetuskan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini sudah mulai dijalankan sejak tahun 2007 dalam rangka memutuskan rantai kemiskinan dengan berfokus pada perbaikan sektor pendidikan dan kesehatan. Program ini merupakan adaptasi dari program perlindungan sosial yang secara luas dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers*. Program ini dinilai cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan di negara-negara berkembang yang menerapkan program ini, terutama masalah kemiskinan kronis.

PKH diluncurkan secara resmi oleh Menteri Sosial dan Pemerintah Daerah pada tanggal 25 Juli 2007 di Gorontalo. Pada awalnya, PKH dilaksanakan di 7 provinsi dengan melibatkan 500.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang akan diberikan dana bantuan dari pemerintah antara Rp.600.000 sampai Rp.2,2 juta per tahun.

Bantuan PKH akan diberikan per 3 bulan, bantuan tersebut akan diberikan kepada ibu/wanita dewasa dalam rumah tangga, bukan diberikan kepada suami. Rincian dana PKH meliputi bantuan tetap Rp 500.000, setiap keluarga per tahun meliputi:

1. Bantuan pendidikan SD/MI Rp 400.000,-
2. Bantuan pendidikan SMP/MTs Rp 450.000,-
3. Bantuan Pendidikan SMA/MA Rp 1.000.000,-
4. Bantuan kesehatan balita Rp 1.200.000,-
5. Bantuan kesehatan, ibu hamil/menyusui Rp 1.200.000,-
6. Bantuan Penyandang Disabilitas Berat Rp 3.100.000,-
7. Bantuan Lanjut usia 70 tahun ke atas 1.900.000,-

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini Thomas (2005:15) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat

kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan seseorang dilihat dari apa yang dimilikinya dan bagaimana kondisi fisiknya sehingga dapat diketahui bahwa orang itu sejahtera atau tidak.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian kualitatif melalui metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Denzin dan Lincoln (2003) menyatakan bahwa Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian, kualitatif data yang biasanya didapat berupa penjelasan, catatan observasi, dokumen dan juga wawancara. Sementara dalam penelitian kuantitatif data yang didapat biasanya berupa angka, koding, pemetaan dan lain sebagainya.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, data yang digunakan dapat berupa data primer maupun data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus. Seperti yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012:246) bahwa bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data, penulis menggunakan *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing verification*. Dalam penentuan informan, penulis menggunakan tekhnis *snowball sampling* dan *purposive sampling*.

## **PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2013-2018**

Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah akan diuraikan berdasarkan teori Stufflebeam yang digunakan oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut.

#### **1. Context (Konteks)**

Dimensi konteks mencakup beberapa hal penting terkait diadakannya Program Keluarga Harapan yaitu Latar Belakang diadakannya Program Keluarga Harapan, tujuan diadakannya Program Keluarga Harapan dan sasaran masyarakat yang akan menerima bantuan dari program ini. Berkaitan erat dengan sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai hasil yang diharapkan dengan melihat kesesuaian antara konsep dengan fakta yang terjadi di lapangan.

#### **A. Latar Belakang Program**

Dalam pelaksanaan suatu program, terlebih dahulu harus diketahui permasalahan yang melatarbelakangi program tersebut dirasa perlu untuk diterapkan. Latar belakang diadakannya Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah adalah tingginya jumlah penduduk miskin. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2017 mencapai 11.400 ribu jiwa, mengalami kenaikan sebesar 0,43% dari tahun sebelumnya.

Semakin tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan hilangnya mata pencaharian masyarakat sebagai penambang timah. Sebelum adanya regulasi mengenai pembatasan pertambangan timah, banyak masyarakat yang membuka pertambangan timah ilegal yang tidak mempedulikan

alam sekitar. Ketika telah selesai melakukan penggalian, bekas galian timah tersebut dibiarkan begitu saja sehingga menciptakan lubang-lubang besar yang mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya. Selain itu juga, saat ini belum ada aturan yang mewajibkan siapapun yang melakukan penggalian timah untuk melakukan reklamasi ketika telah selesai menggali.

## **B. Tujuan Program**

Suatu Program sudah tentu harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan pemahaman kepada para pelaksana terkait program tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan, pada pasal 2 disebutkan mengenai tujuan diadakannya PKH, yaitu :

1. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

## **C. Sasaran Program**

Sebuah program dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengai tujuan awal yang diterapkan dan dapat menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran utama program tersebut diadakan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang PKH, sasaran utama diadakannya PKH adalah :

1. Ibu Hamil/nifas/anak balita;
2. Anak prasekolah/belum masuk pendidikan dasar (usia 5-7 tahun)
3. Anak sekolah SD/MI/Paket A/SDLB (Usia 7-12 Tahun);
4. Anak sekolah SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15 tahun);
5. Anak usia 15-18 tahun
6. Bantuan Untuk Lansia Usian 60 Tahun ke atas
7. Penyandang disabilitas berat



Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, masih banyak anak usia sekolah maupun ibu hamil yang merupakan sasaran dari program ini yang belum pernah sama sekali menerima bantuan PKH ini. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa Program ini belum sepenuhnya menjangkau setiap sasaran program yang telah ditetapkan.

## **2. Input (masukan)**

### **A. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah**

Prosedur pelaksanaan PKH sudah ditentukan oleh Kemensos, pendamping juga diberikan buku petunjuk dalam melaksanakan pendampingan bagi para KPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang PKH. Tujuan diadakannya validasi data adalah memastikan kondisi terakhir dari KPM untuk dinilai apakah masih layak atau tidak untuk menerima bantuan dana dari PKH, karena dalam beberapa kasus pernah terjadi kesalahan dimana masyarakat yang sudah dianggap mampu masih terus menerima bantuan dana bantuan PKH.

### **B. Peran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah**

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendukung kesuksesan Program Keluarga Harapan ini agar dapat membantu pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang sangat sulit untuk dihilangkan di Kabupaten Bangka Tengah. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan adanya pengadaan mobil yang dapat digunakan oleh para pendamping PKH untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh seperti Kecamatan Sungaiselan dan Kecamatan Namang. Selain pemberian mobil, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah juga memfasilitasi para pendamping terkait dengan penyediaan informasi terkait dengan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah yang termasuk dalam kelompok prasejahtera.

### **C. Peran Aparatur Pemerintah dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung PKH di Kabupaten Bangka Tengah**

Sejak pertamakali diadakan pada tahun 2013 hingga sekarang, Program Keluarga Harapan sudah banyak membantu masyarakat miskin agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari usaha pemerintah dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut serta berperan secara aktif dalam menyukseskan program ini. Peran aparatur pemerintah dapat dilihat pada pertemuan bulanan antara para pendamping PKH dan para penerima bantuan yang difasilitasi oleh para aparatur pemerintah baik kecamatan ataupun desa.

### **D. Anggaran yang digunakan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang PKH pada pasal 34 disebutkan mengenai sumber pendapatan PKH yang berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi
3. Anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota
4. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Dalam pendistribusian dana bantuan tersebut tidak ada campur tangan dari Pemerintah Kabupaten ataupun pendamping PKH. Pendistribusian dana tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang dilibatkan sejak awal program ini dicanangkan. Di kabupaten Bangka Tengah sendiri pendistribusian dana bantuan dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam pendistribusiannya tidak ada campur tangan dari pendamping PKH, karena dana bantuan tersebut langsung ditranfer ke rekening khusus yang dipegang oleh KPM.

## **3. Process (Proses)**

### **A. Partisipasi Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan**

Partisipasi aktif dari masyarakat terhadap program ini pun sangat baik. Pada tahun 2018, jumlah KPM mencapai 3053 orang, menjadi yang tertinggi sejak PKH

pertama kali diadakan di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2013.

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti Program Keluarga Harapan ini sangat baik, hal ini dibuktikan dengan antusiasme masyarakat dalam menghadiri pertemuan yang diadakan oleh para pendamping, baik pertemuan dalam rangka sosialisasi ataupun pendampingan terkait penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada para KPM.

## **B. Permasalahan Pelaksanaan PKH di Kabupaten Bangka Tengah**

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah antara lain kondisi wilayah Bangka Tengah yang luas sehingga sulit dijangkau para pendamping, pendidikan masyarakat yang rendah sehingga membutuhkan usaha lebih dari para pendamping dalam melakukan sosialisasi, koordinasi dengan pihak desa dan kecamatan yang terkadang sulit untuk dilakukan sehingga sosialisasi terkadang harus ditunda, dan yang terakhir adalah masyarakat yang sudah lama menerima bantuan tetapi tidak ada menggunakan dana bantuan tersebut dengan bijak sehingga tidak ada perubahan dalam kehidupannya walaupun sudah enam tahun menerima bantuan.

## **4. Product (Hasil)**

### **A. Manfaat PKH di Kabupaten Bangka Tengah**

Adapun manfaat yang dihasilkan dari Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, terutama dalam merubah pola pikir masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang awalnya dianggap tidak penting menjadi sebuah prioritas yang harus dipenuhi.

## **Kesejahteraan Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah**

### **1. Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan indikator yang dijadikan sebagai acuan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di suatu daerah maka akan rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya, sebaliknya semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin di suatu daerah maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya akan semakin meningkat.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah selalu mengalami peningkatan terhitung sejak tahun 2013. Hal ini menandakan bahwa penduduk di Kabupaten Bangka Tengah belum bisa dikatakan sebagai kelompok masyarakat yang sejahtera. Untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini pemerintah memberikan bantuan melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti PKH dan Rastra.

#### **A. Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga**

Dengan adanya PKH, para penerima bantuan merasa sangat terbantu. Selain diberikan bantuan berupa uang, mereka juga mendapatkan pelatihan yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian ketika ketika mereka tidak lagi menjadi KPM. Para KPM sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan primernya dan juga dapat menyimpan hasil yang mereka peroleh dari KUBE.

#### **B. Perumahan**

Semenjak diadakan pertama kali pada tahun 2013, PKH sudah banyak membantu perekonomian masyarakat miskin di Kabupaten Bangka Tengah untuk memenuhi kebutuhan primernya berupa tempat tinggal. Para KPM yang tergabung dalam KUBE rata-rata sudah mulai bisa membeli rumah yang lebih layak untuk ditinggali keluarga mereka.

## **2. Tingkat Kesehatan**

### **A. Ketersediaan Air Bersih**

Air merupakan kebutuhan vital yang harus dipenuhi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas air sangat berpengaruh pada kesehatan pemakainya. Air yang biasanya digunakan oleh masyarakat Kabupaten Bangka Tengah adalah air leding yang disalurkan oleh PDAM Tirta Bangka Tengah.

Kebutuhan air minum bagi para KPM sudah cukup terpenuhi. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah terkadang air yang didistribusikan oleh PDAM volumenya sangat kecil sehingga membuat para KPM untuk membeli air kemasan yang tentu saja memakan biaya tambahan.

### **B. Tempat Berobat**

Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan adanya bantuan dari PKH ini cukup membantu para KPM yang termasuk dalam kategori Ibu Hamil/menyusui untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan bayinya. Selain itu juga, sisa bantuan yang ada dapat dimaksimalkan untuk membuka usaha yang secara tidak langsung membantu perekonomian keluarga. Hal ini merupakan salah satu peran vital dari para pendamping PKH untuk memberikan pendidikan kepada para KPM agar dana yang diberikan harus digunakan untuk kebutuhannya, bukan digunakan untuk hal-hal lain yang tidak bermanfaat.

### **C. Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bangka Tengah selalu mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Dengan adanya peningkatan Angka Harapan Hidup tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah.

### **3. Tingkat Pendidikan**

#### **A. Angka Melek Huruf**

Salah satu indikator yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kualitas pendidikan di suatu wilayah adalah dengan menentukan Angka Melek Huruf wilayah tersebut.

Angka Melek Huruf di Kabupaten Bangka Tengah selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Adanya Program Keluarga Harapan memberikan efek positif bagi masyarakat dimana terjadi perubahan pola pikir yang awalnya sangat menolak pendidikan menjadi sangat peduli akan adanya pendidikan. Masyarakat sudah mulai menyadari akan pentingnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas memiliki peran vital dalam pembangunan suatu daerah.

#### **B. Tingkat Pendidikan rata-rata masyarakat**

Semakin tinggi tingkat pendidikannya dapat dikatakan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia tersebut semakin baik. Penyumbang pengangguran paling tinggi adalah tamatan Sekolah Menengah Atas. Hal ini dapat terjadi dikarenakan banyak perusahaan atau badan usaha memiliki persyaratan untuk pelamar kerja harus memiliki rata-rata pendidikan sarjana.

Program Keluarga Harapan hanya memberikan bantuan sampai pada tingkat SMA/MA saja. tingginya pendidikan atau lamanya sekolah anak tidak menjamin akan mendapatkan pekerjaan seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan yang memiliki standar tinggi dalam penerimaan pekerja baru. Program Keluarga Harapan belum bisa memfasilitasi hal ini, dikarenakan bantuan yang diberikan hanya dibatasi pada SMA/MA saja dan tidak ada bantuan untuk anak yang sudah kuliah. Untuk membantu para KPM, pendamping mencoba memfasilitasi

pertemuan bersama pihak swasta agar para KPM ini bisa diberikan bantuan atau beasiswa selama mengikuti pendidikan lanjutan tersebut.

#### **4. Produktivitas Masyarakat**

##### **A. Kemampuan Masyarakat Menciptakan Usaha**

Masyarakat merupakan target utama diadakannya pembangunan. Pemerintah hanya berperan sebagai pembimbing di lapangan. Selanjutnya masyarakat yang menentukan jalan atau tidaknya usaha yang telah dibangun bersama.

Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan ini memberikan bantuan kepada KPM tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi diberikan juga pelatihan berkebun, bertani, menjahit dan berbagai keterampilan lain yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga ketika para KPM sudah tidak lagi menjadi penerima bantuan, ada keterampilan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian. Selain meningkatkan perekonomian melalui industri kreatif, pemerintah melalui PKH juga memberikan pelatihan berkebun kepada para KPM. Hal ini juga dilakukan guna meningkatkan keahlian dan produktivitas masyarakat kecil agar tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah saja.

Adanya PKH ini berdampak pada produktivitas KPM. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya KUBE yang terbentuk sejak program ini pertama kali diadakan pada tahun 2013. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS jumlah tenaga kerja yang bekerja di Perusahaan kecil dan sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, pertambahannya mencapai 140 orang. Hal ini tentu merupakan suatu pertanda yang positif dan perlu ditingkatkan guna menciptakan masyarakat Bangka Tengah yang mandiri dan sejahtera.

## **Faktor Penghambat Kebijakan PKH di Kabupaten Bangka Tengah**

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut .

### **A. Wilayah Geografis**

Luas Wilayah Bangka Tengah yang mencapai 2.279,11 Km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 6 kecamatan merupakan hambatan tersendiri bagi para pendamping PKH. Dibutuhkan biaya ekstra dan waktu yang tidak sebentar terutama saat validasi data yang mana para pendamping harus datang ke tiap rumah KPM yang jaraknya cukup jauh meskipun dalam 1 wilayah kecamatan.

### **B. Koordinasi antara Pendamping PKH dan pihak kecamatan dan desa yang susah.**

Dalam pelaksanaan PKH, Pendamping diwajibkan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait PKH, yang termasuk di dalamnya adalah pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Dalam pelaksanaannya, terkadang banyak aparatur kecamatan maupun desa tidak ingin memberikan informasi terkait KPM. Selain itu juga, dalam pelaksanaan sosialisasi bersama yang biasanya dilakukan tiap tiga bulan sekali di kantor kecamatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk sosialisasi tidak dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah kecamatan.

### **C. KPM terlalu nyaman dengan bantuan**

Faktor yang menjadi penghambat selanjutnya adalah KPM yang terlalu nyaman dengan bantuan yang ada. Maksudnya adalah para penerima KPM ini ingin mendapatkan bantuan ini secara terus-menerus yang mana ini sudah tidak sesuai dengan tujuan diadakannya PKH ini. Pada kenyataannya, di Kabupaten Bangka Tengah sendiri masih banyak masyarakat yang belum pernah sama sekali menerima bantuan.



## **Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam Mengatasi hambatan pelaksanaan PKH di Kabupaten Bangka Tengah**

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah, Pemerintah Daerah Bangka Tengah melalui Dinsospemdes melakukan berbagai upaya agar hambatan yang ada tidak begitu berarti sehingga tujuan yang telah dicanangkan tetap dapat tercapai. Adapun upaya tersebut adalah sebagai berikut.

### **A. Pemberian Sosialisasi kepada Kecamatan, Desa dan KPM.**

Memberikan Sosialisasi secara rutin tiap 6 bulan sekali kepada seluruh aspek yang terlibat dalam Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah. Sosialisasi ini bukan hanya kepada KPM saja, tetapi juga kepada para aparatur kecamatan dan desa yang memiliki peran penting dalam menyukseskan Program Keluarga Harapan ini.

### **B. Meningkatkan pendampingan kepada para KPM.**

Pendampingan yang intens kepada para KPM. Tujuan jangka panjang diadakannya PKH ini adalah untuk membentuk pola pikir masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinsospemdes memberikan tanggungjawab penuh kepada para pendamping untuk turun langsung mengawasi bantuan yang diberikan kepada masyarakat digunakan dengan baik atau tidak.

### **C. Pemberian Fasilitas bagi para Pendamping PKH oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah**

Sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini, pemerintah memberikan bantuan berupa mobil kepada para pendamping PKH yang diharapkan dengan adanya mobil tersebut dapat memudahkan pendamping untuk menjangkau rumah-rumah KPM yang jauh.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses Pelaksanaan PKH di Kabupaten Bangka Tengah sudah berjalan cukup baik, program bantuan bersyarat ini sudah cukup banyak memberi dampak positif kepada masyarakat khususnya masyarakat yang termasuk dalam kategori masyarakat prasejahtera untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Meskipun demikian, sejak pertama kali diadakan pada tahun 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui PKH belum bisa menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah.
2. Faktor pendukung pelaksanaan PKH adalah adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk pemberian akses kepada pendamping untuk menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinsospemdes Kabupaten Bangka Tengah, faktor pendukung yang lain adalah Masyarakat miskin sangat antusias dalam mengikuti program ini ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah KPM setiap tahunnya dan faktor pendukung yang terakhir adalah kemampuan Pendamping PKH Kabupaten Bangka Tengah yang baik dalam menyelesaikan program ini. Sedangkan faktor Penghambat pelaksanaan PKH di Kabupaten Bangka Tengah adalah wilayah Bangka Tengah yang sangat luas sehingga dibutuhkan usaha ekstra dari para pendamping ketika melaksanakan sosialisasi ataupun pendampingan di tempat tinggal KPM, selanjutnya adalah Koordinasi antara pendamping PKH dan pihak Kecamatan dan desa yang terkadang susah, dan faktor penghambay terakhir adalah KPM yang cenderung nyaman dengan bantuan.
3. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi faktor penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bangka Tengah dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Pemberian Fasilitas kepada para pendamping PKH. Fasilitas yang diberikan adalah mobil untuk memudahkan pendamping untuk menjangkau wilayah-wilayah yang jauh. Selain itu, Dinsospemdes juga memfasilitasi pertemuan antara Pendamping PKH dan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam rangka mensinergikan kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Dengan semakin meningkatnya penduduk miskin di Kabupaten Bangka Tengah, perlu ditambahi pendamping PKH agar dalam pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
2. Penambahan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan seperti pengadaan mobil dan motor untuk memudahkan mobilisasi pendamping PKH dalam tugas menjalankan pendampingan bagi para penerima bantuan.
3. Perlu adanya pertemuan yang berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, kecamatan dan desa bersama para pendamping PKH untuk meningkatkan pengawasan kepada para KPM agar dana bantuan yang diberikan dapat digunakan secara efektif dan efisien.
4. Perlu diadakan *website* yang bisa diakses oleh para KPM sehingga ketika ada permasalahan terkait dengan Program Keluarga Harapan dapat segera mendapatkan solusi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU-BUKU**

Jones, Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta : Erlangga

### **B. PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN**

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.

### **C. SUMBER LAINNYA**

<https://bps.go.id>

